BAB II

PROSES INTEGRASI REGIONAL DI AFRIKA

A. Sejarah Singkat Upaya Integrasi Regional Afrika

Di antara berbagai kawasan yang berada dalam tatanan dunia internasional, Afrika merupakan sebuah area yang memiliki perbedaan pola hubungan internasional dibandingkan dengan kawasan lainnya.[1] Sebagian besar negara di kawasan ini merupakan negara miskin sehingga membutuhkan bantuan dari luar negeri. Selain itu, Afrika tidak pernah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai urusan dunia internasional karena hal tersebut hanya menjadi wewenang dua negara merdeka seperti Ethiopia dan Liberia sebagai pengawasan kekuatan besar. Hal tersebut mendorong Afrika untuk berjuang memperoleh kemerdekaan dan status perifer di lembaga internasional dengan bergabung menjadi anggota PBB sebagai forum untuk memajukan dekolonisasi benua.[2] Sejak Perang Dingin di tahun 1990-1992 Afrika mengakui bahwa aturan partai tunggal itu menyulitkan partisipasi, dan mengarah ke politik dan pemerintahan yang tidak efektif.[3] Dengan adanya perkembangan tersebut telah mengubah seluruh arah evolusi politik di Afrika.

Perkembangan dari regionalisme dan integrasi yang berlangsung pada kawasan Afrika, tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Hoogvelt

---

[1] EcoNews Africa. EPA: Building or Shattering African Regional Integration

[2] Somerville, Keith. 1999. *Africa After the Cold War: Frozen Out or Frozen in Time*, dalam Louise Fawcett dan Yezid Sayigh (eds.), *The Third World Beyond the Cold War: Continuity and Change.*

[3] *ibid*

(dalam Shaw, 2002) mengemukakan bahwa sebelum era globalisasi, Afrika dianggap sebagai benua yang termarginalkan karena budayanya yang seakan memantulkan pengaruh dari globalisasi sehingga membuat Afrika menjadi semakin terbelakang dalam perkembangan ideologi, struktur dan finansial dalam dunia global.[4] Akan tetapi, kehadiran Krisis di Asia dan berakhirnya Perang Dingin yang menandai bergesernya pola tatanan dunia internasional justru mengantarkan Afrika pada sebuah ranah baru.

Sejarah integrasi regional di Afrika berasal dari masa kolonial dan cita-cita supra-nasional dan aspirasi gerakan Pan-Afrika, yang mengupayakan emansipasi politik dan ekonomi benua tersebut.[5] Setelah kemerdekaan, cita-cita ini diterjemahkan ke dalam Jumlah model yang melibatkan lebih dari dua puluh pengaturan kerjasama ekonomi dan lebih dari 120 organisasi sektor khusus, dan semuanya berusaha untuk mempromosikan kerjasama teknis dan ekonomi. Ada tiga entitas integrasi regional yang berfokus pada perdagangan yang dibuat antara tahun 1975 dan 1983 yaitu Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat atau *Economic Comunity of West African States* (ECOWAS), Preferential Trade Area (PTA)/*Common Market for Eastern and Southern Africa* (COMESA), dan *Economc Community of Central African States* (ECCAS). Berbagai pengaturan tersebut berarti bahwa sejumlah besar

[4] Shaw, Timothy M. 2002. *New Regionalism in Africa in the New Millennium: Comparative Perspectives on Renaissance, Realism, and Regressions* dalam Breslin, Shaun dan Hughes, Christopher (eds), *New Regionalism in the Global Political Economy*
[5] Oyejide, TA. 2000. *Policies for Regional Integration in Afica, Economic Research Papers.*

negara memiliki banyak keanggotaan, dengan beberapa negara memiliki sebanyak 25 organisasi yang berbeda.[6] Hal ini, dalam banyak hal merupakan respons yang antusias terhadap ideal pan-Afrika. Tetapi intinya, dan masih ada, bagi komunitas ekonomi regional ini untuk bertindak sebagai blok pembangunan dalam proses yang akhirnya mengarah pada integrasi keseluruhan benua Afrika.

Lagos Plan of Action (LPA, 1980), yang berhasil disukseskan melalui perjanjian Abuja (1994), merupakan representasi dari visi integrasi regional Afrika. Perjanjian ini didasarkan pada proposisi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan cukup kuat dan tidak mungkin tanpa transformasi fundamental struktur ekonomi dan sosial Afrika. Keduanya mengambil pendekatan komprehensif yang tidak berbeda dengan konsep integrasi Uni Eropa.

LPA mengusahakan regionalisme Afrika melalui tiga proses, yaitu: (a) proses integrasi infrastruktur, struktur produksi, dan pasar; (b) resolusi konflik antar negara dan pencegahan tindakan destabilisasi politik; (c) pemeliharaan stabilitas dan keamanan, di tingkat negara-bangsa dan antar negara; dan (d) memfasilitasi pergerakan lintas batas.[7] LPA mengambil pendekatan pragmatis yang dapat dieksploitasi untuk memperkuat integrasi sektoral di tingkat nasional, sub regional, dan tingkat regional.

[6] Adedeji, A. 2002. *History and Prospect for Regional Integration in Africa*
[7] EcoNews Africa. EPA: Building or Shattering African Regional Integration

Terutama di bidang pertanian, transportasi, komunikasi, industri, dan energi.[8]

Dari pembentukan komunitas ekonomi Afrika dan segala keputusannya, terbentuklah kerjasama-kerjasama ekonomi di berbagai negara bagian yang mencakup keseluruhan benua untuk menguatkan komunitas ekonomi regional yang ada. *Economc Community of West African States* (ECOWAS) sudah ada di antara negara-negara Afrika Barat. Afrika Selatan juga memiliki pengaturan kerjasama sosioekonomi yaitu *Southern African Development Coordination Conference* pada tahun 1980an, yang kemudian digantikan oleh *Southern African Development Community* (SADC) pada tahun 1992. Demikian pula, Afrika Selatan dan Timur telah membentuk Preferential Trade Area pada tahun 1981, yang akhirnya menjadi *Common Market for Eastern and Southern Africa* (COMESA) pada tahun 1993. Sebaliknya, di Afrika Tengah, *Economic Community Central African States* (ECCAS) yang diciptakan pada tahun 1983 oleh para pemimpin Persatuan Pabean dan Ekonomi yang sudah ada di Afrika Tengah. Pengaturan di atas diharapkan dapat berfungsi dalam kerangka LPA.

B. Tentang *African Economic Community* (AEC)

Perjanjian yang membangun *African Economic Community* (AEC) diadopsi oleh *Organization of African Union* (OAU) pada pertemuan Kepala Pemerintahan Negara di Abuja, Nigeria pada tanggal 3 Juni 1991.

[8] OAU. 1981. *Lagos Plan of Action for the Economic Development of Africa*

Perjanjian AEC yang juga dikenal sebagai Perjanjian Abuja mulai berlaku setelah ratifikasi anggota yang dipersyaratkan pada bulan Mei 1994.[9] AEC dibentuk untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi bersama di antara mayoritas negara-negara Afrika dengan tujuan sebagai berikut:[10]

a. Mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dan integrasi ekonomi Afrika secara berurutan demi meningkatkan kemandirian ekonomi dan pembangunan yang mandiri.
b. Membentuk rangka kerja kontinental untuk pengembangan, mobilisasi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan material di Afrika untuk mencapai pembangunan yang mandiri.
c. Mempromosikan kerja sama di semua bidang usaha manusia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Afrika dan memelihara serta meningkatkan stabilitas ekonomi, juga mendorong hubungan yang dekat dan damai antar negara anggota dan berkontribusi pada kemajuan, pembangunan dan integrasi ekonomi benua.
d. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan di antara masyarakat ekonomi yang ada untuk mendorong pembentukan Komunitas secara bertahap.

Untuk mencapai tujuan ini, AEC memiliki beberapa organ, yang meliputi: Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan; Dewan Menteri;

[9] Okeke dan Aniche. Economic Regionalism And Dependency In Africa: A Study Of African Economic Community (AEC). 2012
[10] *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)* Vol. 1. No.11: 2012

Parlemen Pan-Afrika; Komisi Ekonomi dan Sosial; Pengadilan Tinggi; Sekretariat Jenderal; dan Komite Teknis Khusus yang terdiri dari Komite mengenai Masalah Ekonomi dan Pertanian Pedesaan, Komite Moneter dan Urusan Keuangan, Komite Bea dan Cukai Perdagangan, Komite Industri, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Komite Transportasi, Komunikasi dan Pariwisata, Komite Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Sosial, Komite Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia.

Tujuan yang ditetapkan AEC meliputi penciptaan kawasan perdagangan bebas, serikat pabean, pasar tunggal, bank sentral, dan mata uang bersama, sehingga membentuk sebuah serikat ekonomi dan moneter. Tujuan ini harus dicapai dalam enam tahap, yaitu penciptaan blok daerah, penguatan integrasi intra-REC(*Regional Economic Community*) dan harmonisasi antar-REC, pembentukan kawasan perdagangan bebas dan bea cukai di setiap blok regional, pembentukan pabean di seluruh benua dan juga wilayah perdagangan bebas, pembentukan *African Common Market* (ACM), pembentukan serikat ekonomi dan moneter dan juga sebuah serikat mata uang dan parlemen. Akhir dari semua transisi Periode adalah paling lambat pada tahun 2034.[11]

[11] *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)* Vol. 1. No.11: 2012

C. Beberapa Kelompok Regional di Afrika

1. *Southern African Development Community* (SADC)

Southern African Development Community (SADC) adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk menjalin kerjasama sosio-ekonomi dan integrasi lebih lanjut serta kerjasama politik dan keamanan di antara 15 negara bagian di Afrika Selatan, Angola, Botswana, Republik Demokratik Kongo, Lesotho, Malawi. , Mauritius Mozambik, Namibia, Seychelles, Afrika Selatan, Swaziland, Tanzania, Zambia Zimbabwe dan Madagaskar dan berkantor pusat di Gaborone, Botswana.[12]

Pada awalnya organisasi ini bernamakan SADCC atau *Southern African Development Coordination Conference* dan didirikan pada bulan April 1980 oleh pemerintah dari sembilan negara Afrika Selatan di Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Swaziland, Tanzania, Zambia dan Zimbabwe. SADCC diubah menjadi Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC) pada tanggal 17 Agustus 1992, dan 17 Agustus dirayakan sebagai hari SADC setiap tahun.[13]

Pembentukan SADC adalah puncak dari proses konsultasi yang panjang oleh para pemimpin Afrika Selatan dengan tujuan yang

---

[12] Anonim. *Southern African Development Community (SADC)* diakses dari: https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/southern-african-development-community-cooperation-april-2012.pdf&ved=0ahUKEwiLqt6srb7VAhVDso8KHYVbD0AQFghGMAQ&usg=AFQjCNHui5N1SgxHGl8fo17KrhNrCiRzaQ pada 5 Juni 2017

[13] *ibid*

lebih luas untuk mengejar pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah ini, yaitu energi, pariwisata, lingkungan dan engelolaan tanah, air, pertambangan, ketenagakerjaan dan tenaga kerja, kebudayaan, informasi, olahraga, transportasi dan komunikasi, dan untuk melaksanakan program dan proyek di tingkat nasional dan regional dan untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan internasional. Sektor lainnya adalah keuangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, pangan, pertanian dan sumber daya alam, hukum dan kesehatan.

Negara-negara SADC menghadapi banyak tantangan sosial, pembangunan, ekonomi, kesehatan, diplomatik, pertahanan, keamanan dan politik. Beberapa tantangan ini tidak dapat ditangani secara efektif oleh anggota individu. Perang di satu negara bisa menyedot tetangganya dan merusak ekonomi mereka. Pembangunan berkelanjutan yang bisa dilakukan perdagangan terancam oleh adanya standar produk dan peraturan tarif yang berbeda, infrastruktur bea cukai yang lemah dan jalan yang buruk. Untuk mencapai hal ini, pada tahun 2008, SADC sepakat untuk membentuk zona perdagangan bebas dengan *East Africa Community* (EAC) dan *Common Market for Eastern and Southern Africa* (COMESA) termasuk semua anggota dari setiap organisasi.[14]

[14] Tesfaye Dinka dan Walter Kennes. *Africa's Regional Integration Arrangements: History and Challenges.* 2007

2. *Common Market for Eastern and Southern Africa* (COMESA)

COMESA berdiri pada tanggal 8 Desember 1994 dan memiliki 19 anggota, yaitu: Burundi, Comoros , Republik Demokratik Kongo (DRC), Djibouti, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Libya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia dan Zimbabwe. Delapan diantaranya (DRC, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Seychelles, Swaziland, Zambia dan Zimbabwe) mrupakan anggota SADC.[15]

Tujuan utama COMESA adalah untuk menghilangkan kelemahan struktural dan kelembagaan negara anggota dan untuk mempromosikan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Negara Anggota COMESA telah sepakat mengenai kebutuhan untuk menciptakan dan memelihara:[16]

a. Area perdagangan bebas penuh yang menjamin pergerakan bebas barang dan jasa yang diproduksi di dalam COMESA dan penghapusan semua tarif dan penghalang non-tarif;

b. Serikat bea cukai dimana barang dan jasa yang diimpor dari negara-negara non-COMESA akan

[15] Anonim. *Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA).* Diakses dari: https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/comesa-august-2012.pdf&ved=0ahUKEwjOxPy2tb7VAhVJvo8KHSPTBlIQFggkMAA&usg=AFQjCNHJNzNuaV2ofN9vs1yy2f6yoEFK1A pada 5 Juni 2016

[16] Ben Road. *The Vision of COMESA/COMESA in Brief* Diakses dari: http://www.comesa.int/uploads/2016/06/comesa-in-brief_2014

menarik satu tarif yang disepakati di semua negara anggota COMESA;

c. Pergerakan modal dan investasi bebas yang didukung oleh adopsi kawasan investasi bersama untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi kawasan COMESA;

d. Pembentukan bertahap sebuah serikat pembayaran berdasarkan COMESA *Clearing House* dan pembentukan serikat moneter bersama dengan mata uang bersama; dan

e. Penerapan pengaturan visa bersama, termasuk hak pendirian yang pada akhirnya mengarah pada pergerakan bebas orang-orang yang bonafid.

COMESA mengurusi beberapa sektor demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh dalam beberapa bidang, diantaranya adalah pertanian, sistem informasi komprehensif, energi, keuangan dan moneter, industri, tenaga kerja, sumber daya manusia dan sosial budaya, hukum, sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta satwa liar, dan lain-lain.

Ada sejumlah organisasi regional yang bekerja sama dengan COMESA. Diantaranya adalah *East Africa Community* (EAC), *Inter-Governmental Authority on Development* (IGAD), *Indian Ocean Comission* (IOC) dan *Southern African Development Community*

(SADC). COMESA memiliki hubungan kerja yang sangat baik, baik formal maupun informal, dengan semua organisasi regional ini. Memorandum of Understanding telah ditandatangani dengan EAC, IGAD dan IOC sehingga organisasi-organisasi ini telah sepakat untuk mengadopsi dan menerapkan program liberalisasi dan fasilitasi perdagangan COMESA.[17] COMESA dan SADC juga telah membentuk Satuan Tugas Bersama untuk menyelaraskan program mereka; Dan di bawah Pengaturan Tripartit, COMESA, EAC dan SADC telah memulai pelaksanaan program dalam mitigasi, pengembangan infrastruktur dan perdagangan Perubahan Iklim, antara lain.

3. *Economic Community of West African States* (ECOWAS)

ECOWAS didirikan pada tanggal 28 Mei 1975 melalui perjanjian Lagos. ECOWAS adalah kelompok regional beranggota 15 orang yang memiliki mandat untuk mempromosikan integrasi ekonomi di semua bidang kegiatan negara-negara yang membentuknya. Negara-negara anggota yang membentuk ECOWAS adalah Benin, Burkina Faso, Tanjung Verde, Pantai Gading, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Senegal dan Togo.[18]

ECOWAS ini dianggap sebagai salah satu pilar Komunitas Ekonomi Afrika, dan dibentuk untuk menumbuhkan cita-cita

[17] *ibid*
[18] Anonim. Economic Community of West African States (ECOWAS). Diakses dari: http://www.ecowas.int/about-ecowas pada 5 Juni 2017

swasembada kolektif untuk negara-negara anggotanya. Sebagai serikat dagang, juga dimaksudkan untuk menciptakan satu blok perdagangan besar melalui kerja sama ekonomi.

Kegiatan ekonomi terpadu yang dipertimbangkan di wilayah ini berkisar tapi tidak terbatas pada industri, transportasi, telekomunikasi, energi, pertanian, sumber daya alam, perdagangan, masalah moneter dan keuangan, masalah sosial dan budaya. Ekspektasi integrasi ekonomi selalu tinggi dan telah banyak dicapai oleh kelompok regional. Saat ini, organisasi tersebut diakui secara global sebagai badan regional yang sukses, bersulang untuk integrasi dan kooperasi regional yang dapat diterapkan.[19]

Visi ECOWAS adalah penciptaan kawasan tanpa batas dimana penduduk memiliki akses terhadap sumber daya yang melimpah dan mampu memanfaatkan hal yang sama melalui penciptaan peluang di bawah lingkungan yang berkelanjutan.[20] Apa yang diciptakan ECOWAS adalah wilayah terpadu dimana penduduknya menikmati pergerakan bebas, memiliki akses terhadap sistem pendidikan dan kesehatan yang efisien dan terlibat dalam aktivitas ekonomi dan komersial sambil bermazmur dalam suasana damai dan aman.

Untuk mewujudkan visi ini ECOWAS melaksanakan program kritis dan strategis yang akan memperdalam kohesi dan secara

---

[19] Tesfaye Dinka dan Walter Kennes. *Africa's Regional Integration Arrangements: History and Challenges.* 2007
[20] *ibid*

progresif menghilangkan rintangan yang teridentifikasi ke integrasi penuh seperti yang diperkirakan.

Upaya yang cukup besar sekarang dilakukan dalam menyelaraskan kebijakan makroekonomi dan promosi sektor swasta untuk mencapai integrasi ekonomi.[21] Upaya ini telah memunculkan beberapa inisiatif yang mencakup implementasi peta jalan untuk program mata uang tunggal ECOWAS, pemantauan dan evaluasi kinerja dan konvergensi ekonomi makro, pengelolaan Database Surveilans Makroekonomi & Multilateral ECOWAS (ECOMAC) serta kerjasama dengan Institusi regional dan internasional lainnya.

4. *Economic and Monetary Community of Central Afrika* (CEMAC)

CEMAC dibentuk pada tahun 1994 dan mulai beroperasi setelah ratifikasi perjanjian pada tahun 1999. Komunitas Ekonomi dan Moneter Afrika Tengah (CEMAC) terdiri dari enam negara: Gabon, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo dan Guinea Khatulistiwa. Dengan jumlah penduduk sekitar 37 juta.[22] CEMAC merupakan organisasi yang cukup muda karena dibuat pada tahun 1994. Namun, akar historis dari proses regionalisasi ini sebenarnya dapat ditelusuri kembali ke awal pasca-kolonial atau bahkan masa kolonial.

---

[21] *ibid*

[22] IDW *(International Democracy Watch): Central African Economic and Monetary Community.* Diakses dari http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/central-african-economic-and-monetary-community

Padahal memang mungkin untuk menemukan ide untuk menciptakan dan menentukan wilayah Afrika Tengah yang sudah berada di akhir abad ke 19 dari keseluruhan proyek kolonialisme Jerman, langkah pertama menuju integrasi regional telah diletakkan di bawah rezim kolonial Prancis. Penyusunan Federasi Equatorial France Africa pada tahun 1919, mengelompokkan kembali Gabon, Kongo Tengah (sekarang Republik Kongo), Oubangui-Chari (sekarang Republik Afrika Tengah), Chad dan Kamerun, dengan tujuan untuk memfasilitasi administrasi wilayah Afrika Tengah di bawah pemerintahan Perancis. Meskipun AEF dibubarkan pada tahun 1958 ketika anggotanya mencapai semi otonomi, negara yang baru merdeka melanjutkan gagasan kerjasama regional di antara mereka di tahun 1960 an.[23]

5. *Southern African Custom Union* (SACU)

SACU merupakan serikat yang beranggotakan 5 negara Afrika Selatan: Botswana, Lesotho, Namibia, Afrika Selatan, dan Swaziland.[24] SACU adalah serikat pabean tertua di dunia yang didirikan pada tahun 1910 sesuai dengan perjanjian antara Uni Afrika Selatan dan Wilayah Komisi Tinggi Bechuanaland, Basutoland dan Swaziland.[25] Dengan dimulainya kemerdekaan untuk wilayah-wilayah ini, kesepakatan tersebut diperbaharui dan, pada tanggal 11 Desember

[23] *ibid*
[24] SACU Website http://www.sacu.int/show.php?id=394&type=About
[25] *African Development Bank Group: The Oldest Customs Union in the World Hails From Africa* diakses dari https://www.afdb.org/en/the-oldest-customs-union-in-the-world-hails-from-africa-12515/

1969, diluncurkan kembali sebagai SACU dengan ditandatanganinya kesepakatan antara Republik Afrika Selatan, Botswana, Lesotho dan Swaziland. Serikat yang diperbaharui secara resmi mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1970. Setelah kemerdekaan Namibia dari Afrika Selatan pada tahun 1990, bergabung dengan SACU sebagai anggota kelima.

Mereka bertemu setiap tahun untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian. Tujuan SACU adalah untuk menjaga pertukaran barang secara bebas antara negara-negara anggota, dengan menyediakan tarif eksternal umum dan tarif cukai umum. Pendapatan dibagi di antara anggota sesuai dengan formula bagi hasil seperti yang dijelaskan dalam perjanjian.

6. *East African Community* (EAC)

EAC adalah sebuah organisasi antar pemerintah regional dari 6 Negara, yaitu: Republik Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan Selatan, Republik Tanzania, dan Republik Uganda, dengan kantor pusatnya di Arusha, Tanzania.

EAC adalah rumah bagi 150 juta warga, dimana 22% adalah penduduk perkotaan. Dengan luas lahan 1,82 juta kilometer persegi dan Produk Domestik Bruto gabungan sebesar US $ 146 miliar (Statistik EAC untuk tahun 2016), realisasinya memiliki kepentingan strategis dan geopolitik yang besar.[26]

[26] EAC Website diakses di https://www.eac.int/about pada 5 Juni 2017

Perjanjian EAC ditandatangani pada tanggal 30 November 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2000 setelah diratifikasi oleh tiga negara mtra yang asli yaitu Kenya, Tanzania dan Uganda. Republik Rwanda dan Republik Burundi menyetujui Perjanjian EAC pada tanggal 18 Juni 2007 dan menjadi Anggota penuh Komunitas yang berlaku mulai 1 Juli 2007. Republik Sudan Selatan lolos ke Perjanjian pada tanggal 15 April 2016 dan menjadi Anggota penuh Pada tanggal 15 Agustus 2016.

Sebagai salah satu blok ekonomi regional dengan pertumbuhan tercepat di dunia,[27] EAC memperluas dan memperdalam kerjasama di antara Negara-negara Mitra dalam berbagai bidang kunci untuk keuntungan bersama mereka. Bidang ini meliputi politik, ekonomi dan sosial. Saat ini, proses integrasi regional berjalan lancar sebagaimana tercermin dari kemajuan yang menggembirakan dari Serikat Pabean Afrika Timur, pembentukan Pasar Umum di tahun 2010 dan penerapan Protokol Uni Moneter Afrika Timur.

D. Keanggotaan Negara-Negara di Afrika Dalam Kelompok-Kelompok Regional Yang Ada

Setelah kita mengetahui beberapa skema utama kelompok-kelompok regional Afrika. Kita perlu mengetahui bagaimana keanggotaan negara-negara di Afrika dalam kelompok-kelompok regional tersebut.

[27] Tesfaye Dinka dan Walter Kennes. *Africa's Regional Integration Arrangements: History and Challenges.* 2007

Karena sangat memungkinkan bahwa satu negara tergabung dalam beberapa kelompok regional.

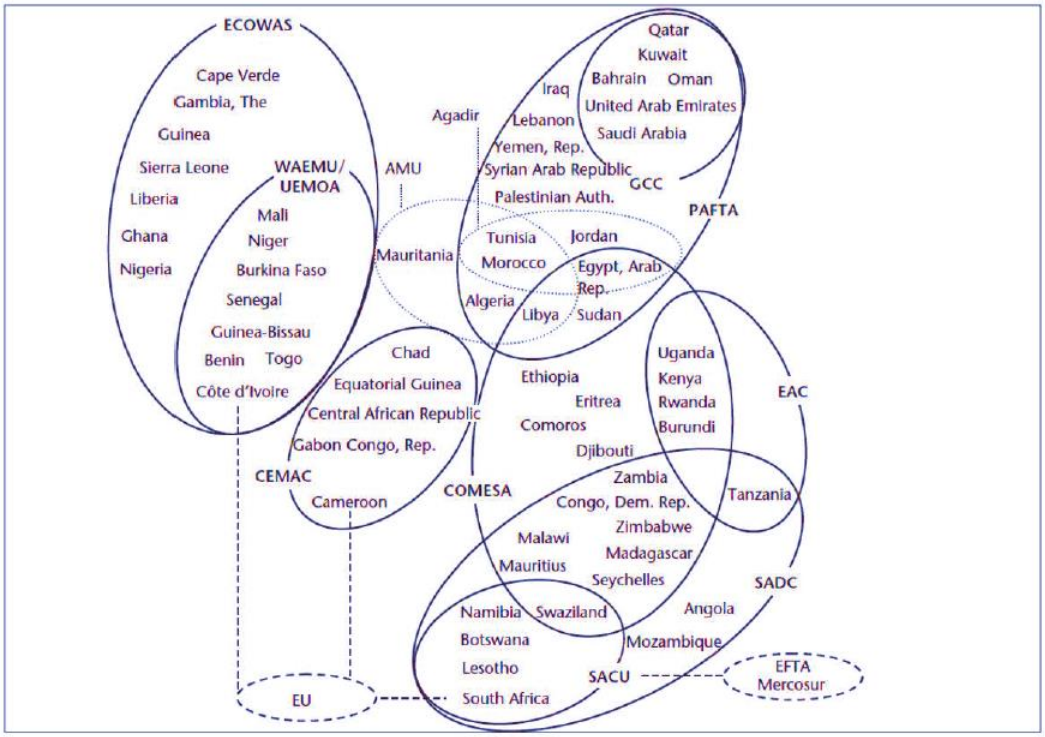

Gambar 1: Skema Keanggotaan Negara-Negara Di Afrika Dalam Kelompok-Kelompok Regional Yang Ada

Sumber: Acharya et al. (2011); WTO Secretariat. Dalam Jaime de Melo dan Yvonne Tsikata (2014)

Dari gambar di atas kita bisa melihat bagaimana keanggotaan negara-negara di Afrika dalam kelompok regiona yang ada. Dan secara jelas, kita bisa melihat tumpang tindih keanggotaan dalam kelompok-kelompok regional tersebut. Keanggotaan yang tumpang tindih bisa menciptakan inkonsistensi perdagangan di antara blok-blok regional. Kita ambil contoh dari negara-negara yang memegang keanggotaan COMESA dan SADC. Dari 15 negara anggota SADC, 9 negara juga termasuk dalam keanggotaan COMESA yang total keanggotaannya adalah 20.

Mengapa hal tersebut dapat menciptakan inkonsistensi perdagangan? Kita lihat Zambia. Zambia merupakan anggota COMESA dan anggota SADC. Negara-negara anggota COMESA sepakat dalam penghapusan tarif dan penghalang non tarif. Namun SADC telah menyetujui tarif eksternal yang sama atau dalam istilah lain adalah untuk mempertahankan tarif. Salah satu negara lain yang tergabung dalam SADC bersama Zambia adalah Afrika Selatan. Afrika Selatan bukan anggota COMESA, maka peraturan penghapusan tarif tidak berlaku untuk Afrika Selatan. Ini artinya, Zambia telah sepakat untuk mengurangi tarif dengan Afrika Selatan (di bawah kondisi COMESA) namun untuk mempertahankan tarif dengan Afrika Selatan (di bawah ketentuan SADC).

Demikian pula kelompok regional lainnya seperti SACU yang telah memiliki kesepakatan dengan Uni Eropa, harus mencari cara bagaimana bernegosiasi dengan negara-negara non-SACU yang merupakan anggota SADC dan COMESA dan untuk mengidentifikasi kelompok mana yang harus dinegosiasikan dengannya. Keanggotaan tumpang tindih dan bersamaan telah menunjukkan beragam kepentingan ekonomi di antara negara anggota SADC dan SACU.

Tumpah tindih keanggotaan tidak hanya menciptakan kebingungan, persaingan dan duplikasi, namun juga merupakan beban dalam hal pembayaran pajak. Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Namibia dan Swaziland adalah anggota SACU dan SADC, sementara Namibia dan Swaziland sama-sama memiliki keanggotaan di tiga perjanjian integrasi

regional dan merupakan bagian dari *Common Monetary Area* (termasuk Afrika Selatan dan Lesotho). Selain itu mayoritas negara anggota SADC juga merupakan anggota COMESA. Hal ini menyebabkan masalah jika masing-masing negara memutuskan untuk membentuk serikat pabean, dengan mengetahui bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat konsisten dalam satu waktu.

E. Sub-Kelompok Dalam Komunitas Regional Afrika

Memang, ada tingginya tingkat proliferasi kelompok ekonomi regional dan subkelompok, atau bahkan kelompok transregional atau crossregional dan subglobal di Afrika. Dengan demikian beberapa negara anggota di blok ekonomi ini tidak menular secara geografis, ditambah dengan adanya hubungan historis di antara anggota kelompok ekonomi ini. Untuk bergerak lebih dekat atau mempertahankan hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara yang memiliki sejarah terkait, negara-negara anggota berupaya membentuk beberapa subkelompok di antara mereka yang terbukti dalam ECCAS, ECOWAS dan SADC.

Tabel 1: Sub-kelompok Berdasarkan *Past Colonial Rulers*

ECCAS Subgroup	**Member States**	**Post Colonial Rulers**
CEMAC	Cameroon CAR Chad Rep. Of Congo Equatorial Guinea Gabon	France France France France Spain France
ECOWAS Subgroup	**Member States**	**Post Colonial Rulers**
UEMOA	Benin Burkina Faso Cote d' Ivorie Guinea Bissau Mali	France France France Portugal France

	Niger Senegal Togo	France France France
WAMZ	Gambia Ghana Guinea Nigeria Sierra Leone	Britain Britain France Britain Britain
SADC Subgroup	**Member States**	**Post Colonial Rulers**
SACU	South Africa Bostwana Lesotho Namibia Swaziland	Britain Britain Britain South Africa Britain and South Afica

Sumber: Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter) Vol 1, No 11; June 2012

Pandangan singkat tentang keanggotaan beberapa subkelompok ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka memiliki pengalaman kolonial yang sama dalam hal penguasa kolonial masa lalu. Tabel di atas menunjukkan bahwa di dalam subkelompok, sebagian besar keanggotaan diambil dari negara bagian yang memiliki penguasa kolonial masa lalu yang sama, dan dengan demikian, sebutan linguistik yang sama. Misalnya, dalam kasus CEMAC dalam subkelompok ECCAS, Hanya Equatorial Guinea yang dijajah oleh Spanyol yang lain dijajah oleh Prancis dan merupakan negara-negara *Francophone*. Kelompok-kelompok regional ini merupakan blok saingan dan berbeda yang bekerja secara implisit dan kedepannya bisa saja semakin memperumit skema integrasi regional di Afrika.

F. Tantangan Integrasi Regional Afrika

Selain tumpang tindih keanggotaan dalam kelompok regional yang telah kita ketahui, integrasi regional Afrika ditandai oleh tantangan serius yang cenderung mendapat perhatian lebih dari pembuat kebijakan UE.

Ada berbagai hambatan terhadap integrasi regional Afrika, seperti kendala keuangan dan sumber daya manusia, infrastruktur yang buruk, kurangnya kapasitas kelembagaan, dan tantangan perumusan kebijakan dan harmonisasi.[28] Masalah ini memperkuat kasus integrasi regional, dan pada saat yang sama menggambarkan apa yang membuat integrasi regional begitu sulit dicapai.

Komisi Uni Afrika dan *African Development Bank* (ADB) telah mengidentifikasi apa saja tantangan-tantangan dalam integrasi regional di Afrika ini, dan tantangan tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Tumpang tindihnya keanggotaan beberapa komunitas ekonomi regional memiliki efek dalam menyebarkan sumber daya yang terlalu tipis, mempersulit proses integrasi kontinental secara keseluruhan, dan memberi tekanan pada kemampuan pemerintah untuk mengelola beragam agenda. Rasionalisasi komunitas ekonomi regional Afrika telah menjadi isu prioritas bagi Uni Afrika, didukung oleh Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Afrika, yang memiliki jadwal untuk mengatasi masalah ini.

[28] EcoNews. *EPA: Building or Shettering African Regional Integration?*

2. Ketakutan kehilangan kedaulatan dan hasil yang tidak merata, terutama bila tidak ada mekanisme kompensasi untuk pembagian yang adil atas manfaat pengaturan regional, telah melemahkan komitmen terhadap integrasi regional dalam beberapa kasus. Tanpa sumber daya yang tersedia untuk mengkompensasi keadaan yang lemah (seperti yang dapat dilakukan Uni Eropa dalam evolusi internalnya sendiri) ketegangan muncul di antara negara-negara terbelakang yang paling miskin dan yang lebih maju dalam sebuah blok politik.
3. Ketidakstabilan politik yang mendasari telah sangat menghambat percepatan integrasi regional di Afrika.[29]

Dalam konteks ini, upaya pada tingkat integrasi ekonomi yang ambisius tidak cenderung memenuhi harapan. Pendekatan yang lebih pragmatis cenderung lebih berhasil dalam jangka pendek, dan juga memberikan fondasi untuk pengaturan jangka panjang yang lebih ambisius. Pendekatan pragmatis semacam itu biasanya kurang membingungkan, karena hal tersebut cenderung memberi keuntungan kepada semua pihak, sehingga tidak memerlukan klaim atau mekanisme kompensasi.[30] Bukan itu saja melainkan dapat menimbulkan sedikit ancaman terhadap kedaulatan nasional, eksploitasi yang melibatkan berbagai negara tanpa harus menekankan ketegangan dan inefisiensi karena adanya keanggotaan yang tumpang tindih. Tantangan-tantangan tersebut merupakan hal yang kemudian

[29] African Development Bank: African Development Report
[30] EcoNews. *EPA: Building or Shettering African Regional Integration?*

harus dihadapi ketika ada perjanjian dan negosiasi yang berfokus dan berniatan membantu Afrika mencapai integrasi regional yang diharapkan.